

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR

Syurya Muhammad Nur

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id

Abstract

Education is the beginning to shape someone to be better with Education also someone can form themselves away from things that are despicable, such as the act of corruption. Corruption is the act of someone who misuse trust in a problem or organization to take advantage. Corruption is an act of crime that harms the country's finances. Violations of the fulfillment of socio-economic rights in social life which are a threat to the ideals of the country towards a just and prosperous society in Indonesia. The existence of law enforcement agencies that have the authority to handle corruption cases, namely the Police, Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission, has the authority to handle corruption cases. The teacher's role is very important for students to provide an understanding of what corruption is and also play a role in instilling the values of honesty towards students, so students can take an honest action and not commit a lie or act of corruption. This study aims to provide an understanding for elementary school students that corruption is an act that is not commendable and to find out how the application of anti-corruption education in primary schools. The research method used is descriptive method by collecting and processing data through library research. The results of this study indicate that corruption education in primary schools is very effective and must be applied properly because the application of anti-corruption education must begin with primary school education..

Keywords: *education. anti corruption. elementary school student*

Abstrak

Pendidikan merupakan awal membentuk seseorang untuk menjadi lebih baik dengan Pendidikan pula seseorang dapat membentuk diri jauh dari hal-hal yang tercela, seperti tindakan korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang salah menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mengambil keuntungan. Korupsi sebuah tindakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan ancaman terhadap cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur di Indonesia. Terdapatnya lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sangat berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Peran Guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang apa itu tindakan Korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswa, agar siswa dapat melakukan sebuah tindakan yang jujur dan tidak melakukan suatu kebohongan atau tindak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar bahwa korupsi itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan korupsi di sekolah dasar sangatlah efektif dan harus diterapkan dengan baik karena penerapan pendidikan anti korupsi haruslah diawali dari Pendidikan sekolah dasar.

Kata kunci : pendidikan. anti korupsi. siswa SD

Pendahuluan

Korupsi adalah permasalahan terbesar yang dihadapi negara dan bangsa ini. Tindak pidana korupsi terjadi dimulai dari korupsi yang sangat sederhana seperti, menyogok dengan sedikit uang untuk mempermudah urusan ketika sedang melakukan pengurusan administrasi di kelurahan

sampai ke korupsi besar-besaran. Dari kasus sederhana tersebut dibentuklah oleh negara berupaya untuk memberantas praktek pidana tersebut dan untuk menghilangkan dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan membentuk badan negara yang diberikan kewe-

nangan luar biasa seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (Mansyur, 2008).

Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak dahulu telah bekerja keras untuk memberantas korupsi dengan metode dan cara yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Pemerintah membuat lembaga yang secara khusus memerangi dan memberantas korupsi yakni KPK, sebagai lembaga independent yang telah melakukan berbagai cara pencegahan untuk tindak pidana korupsi. Melawan korupsi merupakan tanggung jawab dari berbagai komponen di Negara ini, jika satu pihak saja yang memerangi tindakan pidana korupsi maka powernya sangatlah lemah dan sia-sia saja. Maka dari itu dapat menyebabkan kegagalan atau menghambat pem-berantasan korupsi suatu Negara akan dinilai maju / berkembang apabila berhasil melaksanakan berbagai pembangunan sebagai bentuk kemajuan dari Negara tersebut. Oleh karena itu pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan yang meliputi semua jenis-jenis kehidupan makhluk bermasyarakat. Dan pada akhirnya korupsi bermunculan dengan dimulainya usaha pembangunan infrastruktur yang telah dirancang, namun proses birokrasinya relatif lambat, sehingga menginginkan jalan pintas dengan cara memberikan imbalan-imbalan/suap. Hal ini terjadi terus menerus dan tidak terkontrol dari pemerintah dan masyarakat sehingga timbul golongan orang yang memperkaya diri sendiri dengan korupsi yang tidak memberikan contoh baik kepada generasi muda terutama anak usia sekolah dasar. Dengan demikian, sering hal ini terjadi di kalangan elit politik dengan kekuasaan yang dimiliki dan dapat dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maupun golongan, maka dari itu sangat penting kehadiran KPK di negeri ini dan akan sangat penting lagi jika integrasi kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah terutama di sekolah dasar yang merupakan awal seseorang akan bergabung dimasyarakat nantinya.

Terbentuknya KPK yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan edukasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi yang kecil maupun yang besar. Dalam hal ini KPK mempunyai tugas untuk memberikan pengajaran, membimbing dan mendidik siswa bersama-sama pendidik / guru melalui pengajaran yang diberikan kepada siswa. Guru yang merupakan ujung tombak dari perkembangan pengetahuan dan sikap siswa menjadi fasilitator di kelas serta siswa harus diperhatikan dan diberikan bimbingan pembelajaran yang baik, agar siswa dapat menerima informasi pembelajaran dan dapat memahami pembelajaran yang telah dipelajari.

Dalam hal ini sekolah adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar. Pendidikan yang dilaksanakan pada Sekolah Dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengembangkan dirinya secara baik, termasuk didalam pengetahuan antikorupsi.

Pengembangan karakter dan watak siswa melalui pembentukan sikap moral serta kepribadian berasal dari proses yang cukup panjang, bertahap dan berkelanjutan secara masif dengan melakukan cara hal-hal sederhana seperti, pembiasaan-pembiasaan yang sering kali dilakukan oleh siswa. Pendidikan anti korupsi harus terus diterapkan di sekolah terutama pada siswa sekolah dasar, karena tingkat Pendidikan sekolah dasar adalah tingkatan dimana masa yang sangat penting untuk menanamkan sikap, moral dan kepribadian sikap antikorupsi yang dimulai sejak dini.

Dengan dilakukannya penerapan model atau cara pembelajaran yang tepat khususnya dalam mengatasi korupsi, tentunya dimulai pada usia dini agar siswa sebagai penerus generasi bangsa dapat menyiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai ajaran agama dan Pancasila. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang ikut aktif dan bertanggungjawab dalam upaya membentuk karakter siswa dengan pribadi yang positif. Terutama disekolah dasar (SD) (Nawawi, 2016).

Pendidikan antikorupsi sangatlah penting diterapkan disekolah dan sangatlah tepat apabila dimulai disekolah dasar. Menurut Hakim (2012), Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, cara dan tindakan tentang antikorupsi secara konsepsional yang dimungkinkan untuk menyisipkan pada bab mata pelajaran yang sudah ada di sekolah seperti pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan antikorupsi dapat juga diterapkan dalam bentuk mata pelajaran seperti kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal (institusional).

Metode Penelitian

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi Pustaka (library research) sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini.

Hasil Dan Pembahasan Landasan Pendidikan di Indonesia

1. Landasan Filosofis

Pendidikan Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila, bahwa

sistem pendidikan nasional hendaknya memenuhi hak-hak asasi manusia yang harus dijaga keseimbangannya antara hak dan kewajiban, yang mana terkait dengan pemenuhan harkat manusia tentang pendidikan. Untuk memberikan penegasan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia yang antikorupsi dan berkarakter sebaiknya mengimplementasikan ke arah sebagai berikut :

- a. Sistem Pendidikan yang haruslah mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab
- b. Sistem Pendidikan bermuatan nilai dan norma.
- c. Sistem Pendidikan yang selalu mengedepankan hak asasi manusia, demokratis, cinta tanah air, dan memiliki tanggung jawab social yang berkeadilan.

2. Landasan Yuridis

Hakekat pendidikan nasional adalah pejawantahan dari amanah UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan, yang pada setiap ayatnya menjelaskan :

- a. Hak untuk mendapatkan Pendidikan
- b. Kewajiban mengikuti Pendidikan dasar dan dibiayai oleh negara.
- c. Negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan siswa.
- d. Negara mengutamakan anggaran untuk Pendidikan dua puluh persen dari APBN.
- e. Negara memajukan IPTEK dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Dari UUD 1945 Pasal 31 tersebut, lebih ditekankan pada ayat 3 dan 5 untuk membentuk generasi yang anti korupsi melalui Pendidikan.

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi adalah suatu konsep sistem pembelajaran yang mengenai korupsi di Indonesia berupaya memberikan pemahaman tentang tindakan yang tidak terpuji yaitu Korupsi. serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membangun pemahaman tentang bahayanya dan akibat yang akan diterima dari perilaku korupsi.

Target pertama Pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang fenomena kejadian yang mencakup tentang kriteria, akibat dan penyebabnya, serta selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap Tindakan pidana korupsi.

Untuk menerapkan Pendidikan antikorupsi sangatlah efektif dengan melalui jalur pendidikan,

oleh karena itu pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan perubahan sikap mental yang terjadi pada diri siswa, dan melalui Pendidikanlah maka dapat terukur dengan baik dan mudah tentang perilaku korupsi. (Depdiknas, 2009:3).

Menurut Nurdin (2004 : 178) Pendidikan antikorupsi merupakan cara untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara pendidikan formal dan non formal. Pendidikan antikorupsi tidak hanya selesai pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja kepada siswa, akan tetapi terus dilakukan dan berkelanjutan pada pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai antikorupsi menjadi kebiasaan sehari-hari.

Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat Penerapan dalam Pendidikan Antikorupsi

Pelaksanaan pendidikan Antikorupsi mempunyai beberapa faktor-faktor penunjang keberhasilan dari penerapan terhadap pelaksanaan pendidikan antikorupsi, yaitu kesadaran dalam diri sendiri. Pendidikan faktor kesadaran diri sangat diperlukan, hal ini dikarenakan kesadaran diri sendiri yang menentukan dalam dunia pendidikan. Jika diri sendiri sadar akan pentingnya pendidikan antikorupsi maka secara mudah materi yang disampaikan akan diterima dengan baik. Namun sebaliknya, jika diri belum menyadari akan pentingnya pendidikan antikorupsi ini maka, materi yang akan di sampaikan tidak akan bisa diterima dan sia-sia saja. (Kirstiono, 2018).

Dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi ini sangatlah penting dukungan dari masyarakat, agar adanya sinergisitas untuk menerapkan Pendidikan Antikorupsi di sekolah dengan baik. Penerapan Pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar sangatlah tepat, karena anak usia sekolah dasar lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang positif yang diajarkan oleh gurunya.

Adapun penghambat pada penerapan Pendidikan antikorupsi disekolah dasar adalah kurang pahamnya guru sekolah dasar cara pengajarannya yang khusus tentang antikorupsi, karena selama ini hanya mengandalkan pembelajaran di mata pelajaran PPKn sehingga perlunya kerja ekstra oleh guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa sekolah dasar tentang antikorupsi dengan contoh-contoh kongkrit.

Menanamkan Sikap dan Nilai Kejujuran Kepada Siswa

Karakter Jujur adalah suatu sifat dari batin manusia yang dipengaruhi dari pikiran dan tingkah

laku manusia. Sedangkan arti “jujur” adalah mempunyai kelurusan hati dan tidak berbuat curang yang berdampak kepercayaan orang lain kepada kita. Maka dapat disimpulkan jika siswa mempunyai jiwa karakter jujur akan mempengaruhi akal pikirannya untuk selalu berbuat baik dan tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun. Siswa yang memiliki sikap jujur mereka selalu berusaha untuk berbuat baik, bahkan bisa jadi mencegah orang lain berbuat tidak jujur dan tidak baik. Maka dari itu guru haruslah menanamkan nilai kejujuran kepada siswa sejak pertama memasuki lingkungan sekolah, agar siswa pun memahami apa itu jujur dan siswa pun dapat bertindak dalam hal apapun dengan kejujuran.

Ada beberapa metode yang mudah dan dapat dicerna oleh siswa sekolah dasar yaitu :

1. Membuat kantin kejujuran, dengan menyediakan kantin tanpa penjaga, dituliskan harganya dan kotak untuk meletakkan uang dan kembalinya.
2. Memberikan reward bagi siswa yang jujur dalam bersikap dan berbicara.

Menanamkan kebiasaan diri untuk selalu jujur, merupakan hal yang terpenting walaupun dalam hal terkecil akan membuat sikap kejujuran akan selalu menjadi kebiasaan yang baik. Dengan cara sebagai berikut :

- a. Guru harus bisa mencontohkan kepada muridnya hal yang positif, agar siswa dapat meniru sesuatu yang positif. Karena guru merupakan panutan yang akan ditiru oleh siswanya.
- b. Guru harus keterampilan dalam menangani siswa yang sedang bermasalah, tentang apakah dia jujur atau tidak kepada gurunya dalam menyampaikan permasalahan tersebut.

Mengatasi Korupsi di Indonesia

Kasus korupsi di Indonesia tidak kunjung reda, bahkan semakin marak dengan modus-modus baru yang semakin canggih. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu cara dan sistem yang dapat dan mampu mencegah serta menyadarkan masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama memberantas dan mengikis penyakit korupsi yang telah mengakar dan cenderung membudaya. Cara yang paling tepat dan efektif untuk pemberantasan korupsi ya dengan media Pendidikan dan diawali di Pendidikan sekolah dasar.

Pembuatan kurikulum baru yaitu Kurikulum Pendidikan Antikorupsi adalah merupakan salah satu cara dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan secara formal disekolah. Bisa juga melalui Penanaman sikap antikorupsi dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarga-

negara yang juga merupakan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam salah satu bab materinya, yang dapat dijadikan terobosan baru sebagai salah satu solusi dalam rangka memerangi korupsi di Indonesia. Pada pendidikan informal dimasyarakat bisa dilakukan dengan cara penyuluhan, seminar dan sosialisasi.

Kesimpulan

Dengan diterapkan dan dikembangkan Pendidikan Antikorupsi serta menanamkan sikap kejujuran kepada siswa SD merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi di setelah mereka besar dan bergabung dimasyarakat. Agar siswa lebih mengerti tindakan baik dan buruknya hal yang dilakukan dan mengerti apa dan bagaimana bahayanya Korupsi. Mendirikan kesadaran, kejujuran, semangat belajar, dan dimulai dari diri pribadi hal ini sangat lah penting ditanamkan sedari kecil karena dengan hal sederhana seperti ini dapat rnebangun sugesti kepada kita sewaktu dewasa agar melakukan hal yang baik dan bijak

Memberikan pelajaran atau materi pendidikan anti korupsi sedari sekolah dasar. karena hal ini dapat membantu calon penerus bangsa agar tertanam dan tertanam di dalam hatinya bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang salah dan keji. Sehingga ketika kelak sudah dewasa nanti dan bergabung dimasyarakat tidak melakukan tindakan Korupsi. Jika guru menanamkan sikap jujur kepada siswa sejak pertama masuk ruang sekolah, siswa dapat memahami dan mendalami sikap jujur di setiap sesuatu tindakan yang dijalannya kelak sudah dewasa.

Daftar Pustaka

- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol.10. No2.
- Handayani, T. (2009). Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan*, Vol. IV. No 2.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *REFLEKSI EDUKATIKA : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 9, No.1.
- Nawawi, I. (2016). *Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di*

Sekolah Dasar. Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan, Vol. 25, No1.

Nurdin, Muhammad. (2014). *Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah)*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media..

Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi : Pemikiran Muchtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan.